BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara berkembang yang secara terus - menerus melakukan pembangunan diberbagai bidang. Dalam melakukan pembangunan tersebut tidak begitu saja berjalan mulus, akan tetapi banyak hambatan dan tantangan yang dihadapi. Berbagai masalah yang begitu kompleks ada di negeri tercinta Indonesia. Mulai dari kemiskinan, pengangguran, rendahnya pendidikan dan tingginya tingkat kematian, serta musibah dan bencana sering kali menghiasi wajah Ibu Pertiwi. Pemerintah sebagai pelopor penggerak pembangunan memegang peranan yang sangat penting dalam menjalankan roda pemerintahan, bagaimana strategi dan rencana yang digunakan agar pembangunan yang dilakukan dapat berjalan dengan baik, tepat sasaran, adil dan merata sehingga masalah – masalah yang dihadapi dapat diatasi.

Desentralisasi merupakan salah satu cara strategi pemerintah agar pembangunan yang dilakukan merata, dimana setiap daerah diberikan wewenang untuk mengolah daerahnya sendiri. Undang-Undang No. 23 Tahun 2000 pada tanggal 4 Oktober 2000 merupakan payung hukum bagi lahirnya Provinsi Banten. Setelah menjadi Provinsi sendiri, Banten lebih leluasa memanfaatkan potensi sumber daya yang ada untuk mengembangkan pembangunan daerah. Dengan sejumlah potensi sumber daya alam serta sumber daya manusia

yang ada, dapat diprediksi bahwa Banten akan mampu mengembangkan serta membangun daerahnya menjadi lebih maju dari provinsi lain pada masa mendatang.

Sebelumnya, dimana pembangunan daerah hanya dengan kucuran dana 10 persen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang disetorkan ke Jawa Barat, maka setelah menjadi daerah otonom, secara otomatis 100 persen dari PAD akan lebih leluasa digunakan untuk membangun daerah diberbagai sektor. Pungutan pajak dari Bandara Soekarno-Hatta bisa mencapai sekitar Rp 40 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa potensi untuk membangun daerah sangat besar. (Tabloid Banten Ekonomi : 3, Dalam 9 Tahun Banten Membangun).

Banten memiliki daerah seperti Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kota Serang, Kota Cilegon dan Kota Tangerang, kesemuanya mampu menyumbang PAD cukup besar bagi pembangunan daerah. Sebagai contoh Cilegon dikenal sebagai daerah sentra industri, sementara Pandeglang dan Lebak memiliki sumber emas, batu bara, keramik serta kelapa sawit, sedangkan Tangerang sebagai pusat kegiatan ekonomi dan investasi.

Secara kasat mata, Banten merupakan Provinsi yang memiliki sumber daya alam cukup besar, terutama di daerah Kabupaten Lebak dan Pandeglang. Selain dikenal sebagai daerah industri, predikat sebagai daerah agraris (pertanian) maupun maritim (kelautan) merupakan nilai tambah bagi pembangunan daerah kedepan. Hal ini tentu saja harus memerlukan sebuah perencanaan yang matang dan tepat guna dalam merancang dan melakukan

pembangunan. Melihat sebagian besar masyarakat Banten adalah petani dan nelayan.

Terbentuknya Provinsi Banten didasari dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan daya saing daerah karena sejak puluhan tahun lalu masyarakat Banten selalu terpinggirkan oleh daerah lain terutama di Jawa Barat, Juga untuk meningkatkan sumber daya manusia yang selama ini tenggelam, serta untuk membangun kemandirian masyarakat dalam bidang ekonomi.

Dalam sejarah perjuangan masyarakat Banten demi terwujudnya sebuah Provinsi yang mandiri dan otonom, maka harus kita lihat bahwa dalam konteks pemekaran suatu wilayah, khususnya Provinsi, tidak hanya sekadar pemekaran wilayah secara "geografik-teritorial". Akan tetapi yang lebih penting adalah terciptanya keadilan sosial tanpa kecuali dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Banten ternyata belum sepenuhnya dapat dirasakan oleh masyarakat. Padahal dengan sejumlah potensi yang dimiliki seharusnya pembangunan Banten lebih maju dari tahun-tahun sebelumnya. Akan tetapi kemiskinan, pengangguran maupun pendidikan hanya sebatas retorika serta masih diatas angka-angka, namun sebetulnya masih belum beranjak alias tidak ada perubahan, hal ini disebabkan karena pembangunan belum menyentuh kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

Program pembangunan yang sedang dipacu oleh pemerintah Provinsi Banten, belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Banyak ketimpangan yang terjadi. Dimana wilayah Utara jauh lebih maju dibanding

wilayah Selatan dengan perbandingan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yaitu 88,63 % di wilayah Utara seperti Tangerang Selatan dan 11,37 % di wilayah Selatan yaitu Lebak dan Pandeglang. Pencapaian pertumbuhan ekonomi yang diatas 6 % merupakan indikator makro, akan tetapi belum menjangkau sektor riil yang ada dimasyarakat, seperti jumlah pengangguran, pendidikan serta kemiskinan.

Penyebab tidak meratanya pembangunan di Banten menurut mantan Dirut Bukopin Muchtar Mandala disebabkan tiga hal, pertama para pemimpin baik eksekutif maupun legislatif baik di tingkat provinsi maupun tingkat kota dan kabupaten masih dalam euphoria, masih dalam mencari kesenangan masing-masing terhadap jabatan yang di embanya. Belum menjurus atau belum tersentuh terhadap apa yang diinginkan rakyat, atau lebih mementingkan diri sendiri sehingga tatanan belum terarah untuk menyerap apa fungsi utamanya. Mereka sibuk di lingkungan elitnya sehingga elitnya yang kelihatan makmur. Kedua, birokrasi dan pelayanan masih begitu-begitu saja, dan ketiga sangat kompleks karena perrmasalahan ini tidak terlepas dari perundang-undangan makro dan otonomi daerah, sehingga masalah yang ada menimbulkan masalah yang baru. (Tabloid Banten Ekonomi : 3).

Dilihat karakteristik masyarakatnya maupun geograpik-teritorialnya, dimana petani dan nelayan merupakan sumber mata pencaharian sebagian besar masyarakat. Kedua faktor tersebut mampu dijadikan sektor andalan dalam mendorong dan menggerakkan roda perekonomian masyarakat, hal ini sudah terbukti dimana sektor pertanian dan kelautan merupakan sektor yang tahan

terhadap gejolak pasar maupun ekonomi. Indonesia pernah mengalami krisis multidimensi, ekonomi, politik dan lain – lain. cukup parah pada tahun 1997 hingga 2000. Akan tetapi ketika krisis ekonomi terjadi dimana sektor industri, manufaktur dan jasa terkena imbas, sektor pertanian dan kelautan tetap eksis dan bahkan mampu menjadi sumber devisa bagi negara, selain minyak bumi dan gas.

Pemerintah daerah harus tanggap dan cermat dalam merancang pembangunan, sehingga cita-cita awal pendirian Provinsi Banten tidak hanya sekedar retorika belaka, akan tetapi mampu diwujudkan secara nyata bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan amanat UUD 1945 yang berbunyi "melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial....." dan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945. "Bumi, air dan seluruh kekayaan yang terkandung didalamnya digunakan sebesar-sebesarnya untuk kemakmuran rakyat". Serta UU No 32 Tahun 2004 yaitu meningkatkan daya saing daerah, meningkatkan kesejahteraan serta meningkatkan keadilan. Sudah sewajarnya jika arah pembangunan Banten lebih di fokuskan kepada budaya asli masyarakat, yaitu pertanian dan sektor UKM tanpa mengesampingkan sektor lainnya seperti industri, jasa, transportasi dan komunikasi.

Agar terdapat keseimbangan antara ekonomi berbasis sumber daya alam dan ekonomi berbasis manufaktur terutama di daerah Pandeglang khususnya wilayah Kecamatan Pulosari, yang merupakan daerah dengan potensi sumber daya alam yang melimpah baik pertanian, perkebunan, tempat pariwisata maupun

kehutanan. Maka perlu ditelaah secara mendalam agar potensi yang ada bisa dikelola dengan baik, dan pemanfaatan yang benar tanpa merusak keberadaan lingkungan. Sehingga masyarakat yang berada disekitar wilayah tersebut dapat hidup sejahtera, besahabat dengan alam dan terjaga keseimbangannya.

Ironis, walaupun sumber daya alam melimpah ruah akan tetapi masyarakatnya masih miskin. Banyak masyarakat yang tertinggal dan bahkan masih banyak masyarakatnya belum tersentuh buah karya Thomas Alfa Edison alias listrik. Data dari desa Sukasari, sebanyak 394 Rumah dari 996 kepala keluarga, belum memiliki jaringan listrik, yang diakibatkan karena ketidakmampuan memasang listrik dan membayar beban nantinya, juga tidak meratanya pembangunan listrik diwilayah tersebut. Tingkat pendidikan yang rendah dan pola pikir yang kolot, dan budaya yang malas juga menjadi pemicu kemiskinan di wilayah ini.

Salah satu tujuan dari wilayah memekarkan diri menjadi kecamatan adalah agar pelayanan publik dapat terlaksana dengan baik, artinya kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan. Kecamatan Pulosari sebagai wilayah yang baru memekarkan diri dari Kecamatan Menes, Kecamatan Jiput dan Kecamatan Cisata sebagai kecamatan yang berdiri sendiri dengan jumlah penduddduk 26960 jiwa pada tahun 2008. (sumber BPS Kab.Pandeglang 2008). Dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah No.2 tahun 2007. Tentang pembentukan Kecamatan Pulosari dan Kecamatan Keroncong di wilayah Kabupaten Pandeglang. Dengan luas wilayah 3.313 Ha, memiliki 9 Desa, 52 RW, 154 RT. Serta memiliki sarana pendidikan 20 SD, 3 SLTP, 3 MTS, 1 MI dan 21 MDA. Serta memiliki sarana

transportasi yang strategis sebagai jalan lintas wisata untuk di lewati para turis, juga memiliki sarana produksi yang bagus dalam bidang pertanian, perternakan, perkebunan maupun perhutanan. Dilengkapi dengan sarana peribadatan, dan kelembagaan-kelembagaan lainya. Lokasinya yang diapit pegunungan menjadikannya memiliki potensi kekayaan alam yang bagus, seperti Curug putri di Cilentung, Mata air Cipanas di Desa Banjarnegara, Situs Citaman dan Batu Goong di Desa Sukaraja, dan Kawah Gunung Pulosari di Puncak Gunung Pulosari. Dan memiliki 13 situs purbakala. Namun keberadan tempat-tempat wisata tersebut tidak mendatangkan devisa.

Kecamatan Pulosari ini memiliki visi ”Mendorong Terwujudnya Pemerintahan Kecamatan Pulosari kabupaten pandeglang yang Memiliki Pelayanan yang Prima dengan Memiliki Aparatur yang Berkualitas dan Disiplin Tinggi, Bertanggung jawab, Bersih dan Berwibawa Sebagaimana Moto Kecamatan Pulosari ” J U S” (Jujur, Ulet dan Sabar).

Sedangkan Misi Kecamatan Pulosari sebagai berikut ini:

1. Penyediaan sarana dan prasaran yang memadai di kecamatan dan desa
2. Peningkatan kapasitas SDM aparatur kecamatan dan desa melalui pendidikan, pelatihan serta kursus-kursus.
3. Pembinaan desa
4. Peningkatan perekonomian pedesaan
5. Mendorong pertumbuhan rasa tanggungjawab melalui pembinaan wewenang pada tiap-tiap personil

6. Menumbuhkembangkan partisipasi swadaya gotong-royong masyarakat serta menggali potensi yang ada untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui pembinaan kepada masyarakat secara berkala.

Untuk mencapai Visi dan Misi tersebut Kecamatan Pulosari menerapkan berbagai strategi diantararanya dengan pembuatan gedung PUSKESMAS agar pelayanan dibidang kesehatan masyarakat terlayani, juga pendiirian sekolah baru dan fasilitas-fasilitas lainnya yang dapat dijangkau masyarakat. Melihat wilayah ini adalah wilayah pegunungan dan masyarakatnya tinggal menyebar dipelosok-pelosok yang sedikit menyulitkan untuk mendapatkan pelayanan, sehingga dibentuk Kecamatan Pulosari dengan tujuan peningkatan pelayanan prima. Sesuai dengan peranannya kecamatan memiliki peran yang penting karena:

1. Kecamatan merupakan ujung tombak dari penyelenggaraan pemerintah yang langsung berhadapan dengan masyarakat luas. Citra birokrasi pemerintahan secara keseluruhan akan banyak ditentukan oleh kinerja organisasi tersebut.
2. Kecamatan merupakan *line ofice* (garis depan) dari pemerintahan pusat yang berhadapan langsung dengan masyarakat dan mempunyai tugas membina desa sehingga harus pula diselenggarakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Wasistiono (1992: 12)

Sekalipun memiliki Sumber Daya Alam yang melimpah, Anggaran yang baik dari pusat maupun daerah, kecamatan yang berusia 3 tahun ini belum menyentuh pada permasalahan yang ada. Hal ini masih terlihat dengan tingginya tingkat angka kemiskinan mencapai 3213 RTS dan rendahnya kualitas sumber

daya manusia, belum optimalnya hasil pertanian, keterbatasan infrastruktur, prasarana dasar wilayah seperti jalan dan jembatan. (Sumber RKSKPD Kecamataan Pulosari tahun 2010). Ditambah dengan penurunan kualitas pemeliharaan jalan dan jembatan, jaringan irigasi serta listrik desa.

Rendahnya kualitas pelayanan administrasi seperti pembuatan KTP, pembuatan Kartu Keluarga dan surat menyurat lainnya, seringkali terhambat dengan berbagai alasan serta waktu yang dibutuhkanpun cenderung lama. Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam menggagas pembangunan desa masing-masing serta sederetan masalah lain baik secara fisik maupun non fisik.

Sebagai wilayah yang memiliki luas tanah sawah 1.392 Ha dengan irigasi teknis 213 Ha dan irigasi setengah teknis seluas 909 Ha, serta memiliki tanah kering 937 Ha dan tanah hutan seluas 984 Ha. Harusnya pertanian maju pesat. Bentuk wilayahnya berombak sampai berbukit dan pegunungan mencapai 90%. (Data Monografi Kecamatan, Desember 2008 : 1). Hal itu menunjukan sosialisasi atau pembinaan pemerintah terhadap pengelolaan lahan yang baik kurang optimal.

Pulosari dan Aseupan merupakan gunung yang ada di wilayah kecamatan tersebut, sebagai bagian penyedian air bersih terhadap kebutuhan air masyarakat Pandeglang, baik kebutuhan pokok maupun untuk pertanian. Akan tetapi kelestarian dan sangat vitalnya gunung tersebut kurang mendapat perhatian dari pemerintah maupun masyarakat sekitar. Banyaknya pencuri kayu dan penebang liar / ilegal, marak terjadi. Akibatnya ketika hujan deras gunung longsor besar. Bahkan jika musim kemarau panjang masyarakat banyak yang kekurangan air, karena sumber mata air yang kering sehingga untuk mendapatkan air bersihpun

terkadang harus berjalan dengan menempuh jarak yang jauh. Hal itupun menunjukan pula bahwa Kecamatan Pulosari belum optimal dalam menyelesaiakan permasalahan yang ada, baik dalam bidang pelayanan terhadap masyarakat maupun dalam mengelola SDA yang dimilikinya,

Bagaimana strategi yang harus diterapkan untuk menyelesaikan masalah - masalah seperti di atas adalah menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat, diyakini karena setiap masalah pasti akan mendatangkan solusi dan mengarahkan pada kedewasaan.

Atas dasar permasalahan itulah peneliti mengkaji dan meneliti dengan judul "Analisis Perumusan Strategi Perencanaan Pembangunan Melalui Pendekatan *SWOT* di Kecamatan Pulosari Kabupaten Pandeglang.

I.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka peneliti mencoba mengidentifikasi permasalahan yang terkait dengan potensi sumber daya alam yang melimpah yang dimiliki Kab. Pandeglang khususnya wilayah Kecamatan Pulosari, yang baru berusia dini dalam pemekaran serta berkaitan dengan pelayanan yang diberikan terhadap masyarakat, maupun permasalahan lainnya. Yakni sebagai berikut:

1. Tingginya angka kemiskinan dan pengangguran
2. Rendahnya kualitas Sumber daya manusia
3. Sumber daya alam yang tidak terolah dengan baik.
4. Fasilitas – fasilitas sosial yang tidak memadai

5. Pembangunan struktural dan infrastruktural yang tidak merata.
6. Prosedur pelayanan administrasi seperti pembuatan KTP, KK yang tidak sesuai dengan standar waktu yang ditentukan.
7. Rendahnya pembinaan terhadap masyarakat dalam pengoptimalisasi desa.

I.3 Batasan Dan Rumusan Masalah

Karena keterbatasan peneliti terkait dana, waktu, dan tenaga serta pikiran maka peneliti mencoba memberikan batasan masalah pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Alternatip apa saja dalam strategi perencanaan pembangunan yang dijalankan oleh Kecamatan Pulosari?
2. Bagaimana pelaksanaan strategi perencanaan pembangunan dalam upaya meningkatkan kualitas pembangunan di Kecamatan Pulosari dengan pendekatan *SWOT* analisis?

I.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan rumusan masalah. Maka penelitian ini bertujuan untuk menjawab masalah - masalah yang ada, diantaranya untuk:

1. Mengetahui alternatif strategi perencanaan pembangunan yang dijalankan oleh Kecamatan Pulosari.

2. Meningkatkan kualitas pembangunan di Kecamatan Pulosari dengan menganalisa faktor eksternal maupun internalnya, melalui pendekatan Analisis *SWOT*.

I.5 Manfaat Penelitain

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi. Baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Secara Teoritis, antara lain: Diharapkan dapat mengembangkan teori yang ada yang diperoleh selama perkuliahan dan dapat menemukan makna baru selama penelitian serta dapat dijadikan pemahaman untuk penelitian selanjutnya. Juga untuk meningkatkan kualitas belajar, memberikan pengetahuan dan pengantar wawasan yang luas bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa FISIP Ilmu Administrasi Negara.
2. Manfaat secara praktis, antara lain: Dapat memberikan masukan yang berguna untuk aparat Kecamatan Pulosari dalam melakukan perencanaan pembangunan. Sehingga mendorong pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Khususnya pembangunan di Kecamatan Pulosari, umumnya Kabupaten Pandeglang selaku komando anggaran pembangunan dari pusat.

1.6. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah :

BAB I PENDAHULUAN : Dalam Bab I yaitu pendahuluan terdiri dari Latar Belakang Masalah yang menggambarkan ruang lingkup serta kedudukan masalah

yang akan diteliti dalam bentuk uraian secara deduktif. Identifikasi Masalah yaitu masalah yang muncul dimana berkaitan dengan tema/topik penelitian. Pembatasan dan Perumusan Masalah yaitu menetapkan masalah yang paling urgen yang sesuai dengan judul penelitian serta mendefinisikan masalah yang telah ditetapkan dalam bentuk definisi konsep dan definisi operasional. Serta berisi tujuan penelitian ini dibuat dan manfaat penelitian yang berisi uraian manfaat secara teoritis maupun praktis.

BAB II DESKRIPSI TEORI : Dalam Bab II merupakan Deskripsi Teori yang relevan dengan permasalahan dan Kerangka Berfikir yang menggambarkan alur pikiran peneliti sebagai kelanjutan dari kajian teori.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN : Dalam Bab III memaparkan Metode Penelitian. Instrumen Penelitian yang menjelaskan proses penyusunan dan jenis alat yang digunakan dalam pengumpulan data serta teknik penentuan kualitas instrumen. Teknik Pengolahan dan Analisa Data, Tempat dan Waktu dalam pelaksanaan penelitian tersebut.

BAB IV HASIL PENELITIAN : Dalam Bab IV memaparkan Deskripsi Objek Penelitian. Deskripsi Data yakni data mentah yang telah diolah menggunakan teknik analisis data yang relevan. Dan pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB V PENUTUP : Dalam Bab V yaitu Penutup, dipaparkan Simpulan dan Saran yang diungkapkan peneliti terkait dengan judul penelitian yang diangkat peneliti.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN